



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA PD) PROVINSI RIAU
TAHUN 2024**



**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI RIAU**

Jalan Jenderal Sudirman No. 462 Telp/Fax (0761) 34068

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Pekanbaru Telp (0761) 26613

PEKANBARU



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, menyebutkan bahwa rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
10. Peraturan Presiden 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 3);

17. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2022 tentang Peraubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 4);
18. Peraturan Gubernur Riau Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2024.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 dan dokumen lainnya yang mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 24 Agustus 2023

GUBERNUR RIAU,



SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 24 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,



S.E. HARIYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2023 NOMOR 31

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau Tahun 2024 telah di susun sesuai dengan ketentuan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau Tahun 2024 merupakan wujud nyata dari pelaksanaan Rencana Pembangunan yang berbasis kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024. Diharapkan nantinya Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 ini dapat menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pada saat pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau Tahun 2024.

Wassalaamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh.

Pekanbaru, 24 Agustus 2023

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN PROVINSI RIAU,



Dra. Hj. MIMI YULIANI N, Apt, MM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19660717 199102 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABEL..... iii

DAFTAR GAMBAR..... iv

BAB I. PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum..... 5

1.3 Maksud dan Tujuan..... 7

1.4 Sistematika Penulisan..... 8

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022..... 12

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah..... 12

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 18

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah... 21

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD..... 31

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 36

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... 40

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 40

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah..... 41

3.3 Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan 42

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 51

BAB V. PENUTUP..... 66

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2022 Provinsi Riau.....	13
Tabel 2.2	Realisasi Per program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau Tahun 2022	17
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau	20
Tabel 2.4	Renstra Perpusnas RI dan ANRI penyelenggaraan Urusan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan	24
Tabel 2.5	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Riau.....	32
Tabel 2.6	Usulan Program Dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Provinsi Riau.....	38
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau	41
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Strategis	44
Tabel 4.1	Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Riau Tahun 2024.....	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Diagram Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah	2
Gambar 1.2	Diagram Keterkaitan Dokumen dengan Dokumen Perencanaan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L	4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

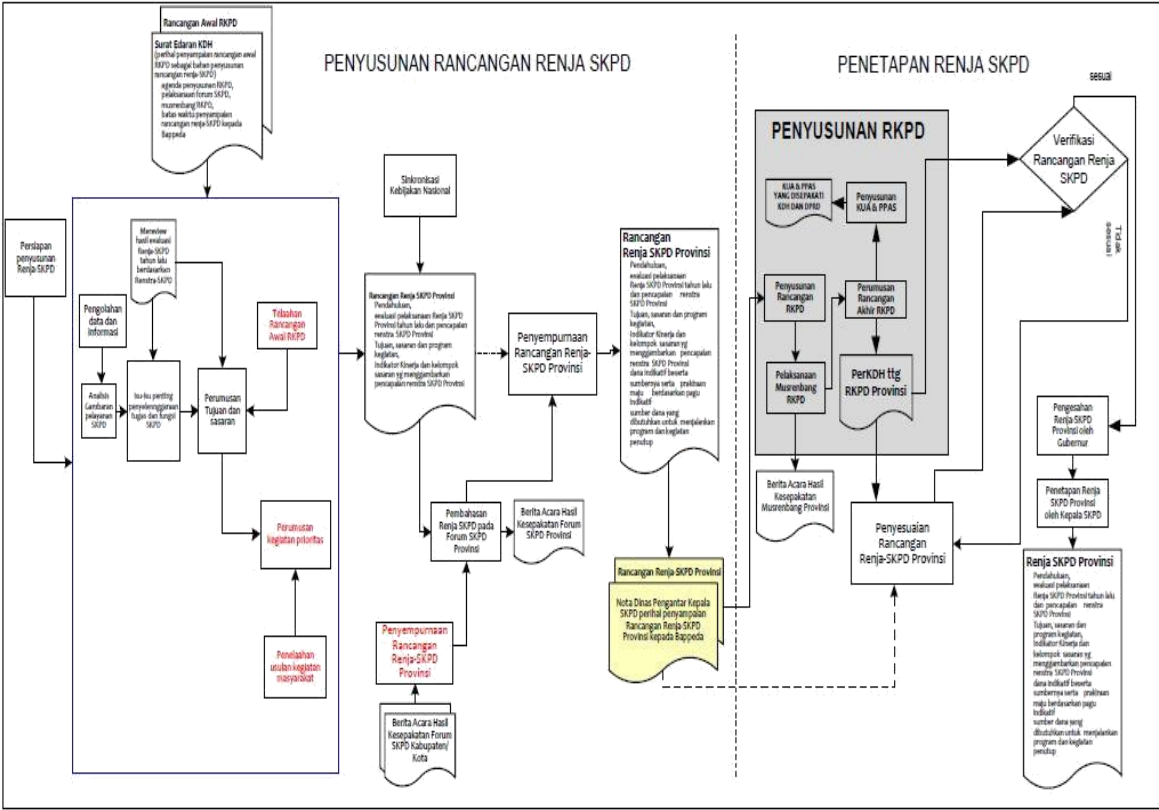
Pengertian Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat (Renja PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja PD memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau sebagai Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Riau menyusun dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau Tahun 2024. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau ini juga mengacu pada kebijakan Pemerintah Provinsi Riau, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau yaitu Misi **5 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Informasi**, yang menitik beratkan pada peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel serta peningkatan pemanfaatan teknologi informasi, untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima mencakup semua lapisan masyarakat.

Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Gambar Diagram Proses Penyusunan Renja dapat dilihat pada gambar 1.1 bawah ini:

Gambar 1.1
Diagram Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah



Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

1. **Persiapan Penyusunan**
Persiapan penyusunan Renja meliputi: (a) Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim penyusun Renja Perangkat Daerah (b) Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah (c) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan (d) Penyiapan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
2. **Penyusunan Rancangan Awal**
Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup: (a) Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan (b) Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

3. Penyusunan Rancangan

Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah tersebut dibahas dan disempurnakan dalam Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dan sudah harus selaras dengan Rancangan Awal RKPD.

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappedalitbang Pemerintah Provinsi Riau dan dilakukan pembahasan dengan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.

5. Perumusan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Perumusan Renja PD Perangkat Daerah, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi Renja PD berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan Renja PD dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

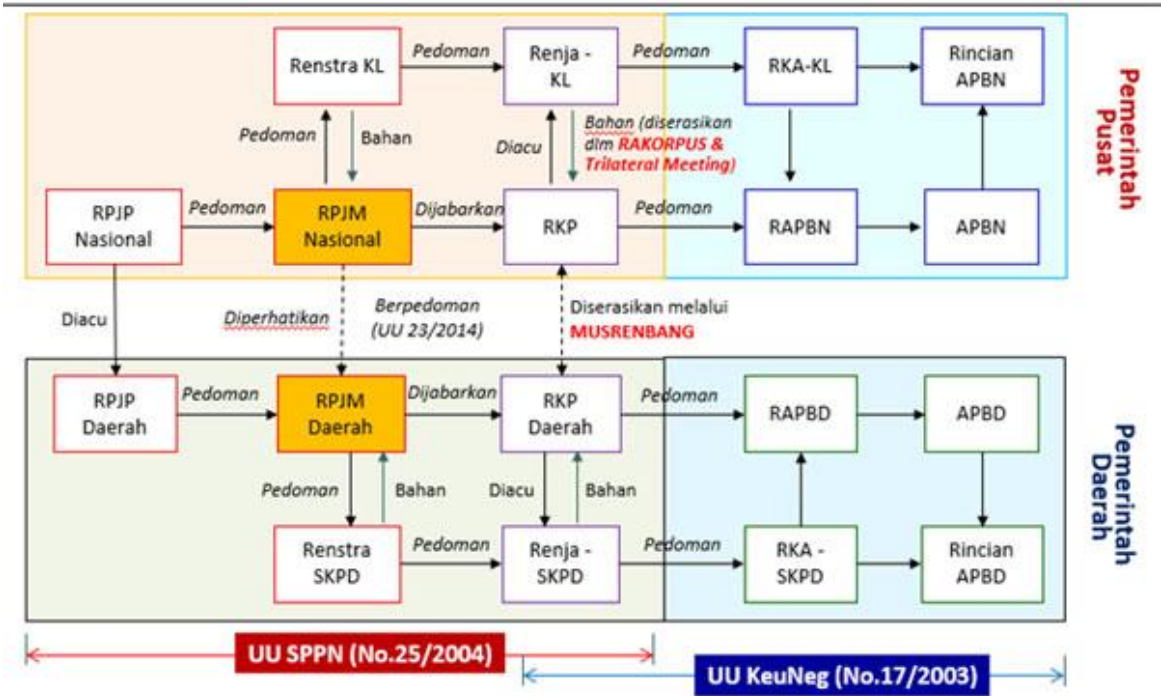
6. Penetapan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau menyampaikan seluruh Renja PD Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Penyusunan Rancangan Akhir Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau Tahun 2024 menjabarkan rencana kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau yang sesuai dengan tugas dan fungsinya mengacu kepada Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau.

Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD dapat dilihat pada gambar 1.2 diagram berikut:

Gambar 1.2
Diagram Keterkaitan Dokumen dengan Dokumen Perencanaan RKPD,
Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L



Penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau dari Rancangan Awal Renja sampai Rncana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dipengaruhi oleh dokumen perencanaan lainnya yaitu RENSTRA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau, Rancangan Awal Renja PD, Rancangan Renja PD, Rancangan Akhir Renja PD dan RKPD.

Pada penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada RENSTRA Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan berpedoman pada:

1. Renstra Perangkat Daerah, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.
2. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan.

Rancangan Renja kemudian disempurnakan menjadi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah dan RKPD. Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada Rancangan Akhir RKPD. Rancangan Akhir Renja PD tersebut juga dibahas dan disempurnakan antara Perangkat Daerah dan Bappedalitbang dan disampaikan kepada Bappedalitbang Provinsi Riau untuk diverifikasi.

Verifikasi tersebut harus dapat menjamin Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan RKPD. Hasil verifikasi Rancangan Akhir Renja PD Tahun 2024 tersebut akan dijadikan bahan penyempurnaan RKPD.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Akhir Perangkat Daerah (Renja PD) Provinsi Riau Tahun 2024, payung hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 11);
19. Peraturan Gubernur Riau Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Sistem Rencana Kerja Pemerintah Daerah secara Online Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 42);
20. Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Riau Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021);
21. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 42);
22. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2024;

1.3. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau Tahun 2024 disusun dengan maksud:

1. Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau dimaksudkan untuk memberikan arah dan acuan akhir dalam penyusunan program dan kegiatan periode 1 (satu) tahun sebagaimana yang diamanatkan dalam Perubahan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau tahun 2019-2024;
2. Menjabarkan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau jangka pendek 1 (satu) tahun untuk tahun 2024;
3. Merumuskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau dengan mengacu kepada dokumen perencanaan lainnya serta memperhatikan permasalahan yang ada, untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau dalam pembangunan daerah;
4. Menyelaraskan Rencana Strategis Provinsi Riau dengan pelayanan Perangkat Daerah, usulan masyarakat, dan evaluasi kinerja tahun lalu menjadi rencana strategis Perangkat Daerah;
5. Untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan atau tercapainya tujuan pelayanan publik pada tahun 2024.

Tujuan Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau Tahun 2024 adalah:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau dalam jangka 1 (satu) tahun;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau;
3. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan;
4. Menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah;
5. Untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyajian Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah sekurang-kurangnya dapat disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

- 1.1 Latar Belakang, Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah; dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
- 1.2 Landasan Hukum, Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
- 1.3 Maksud dan Tujuan, Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah
- 1.4 Sistematika Penulisan, Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan

5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, berisikan uraian mengenai

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah Khusus Provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda dan

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten/Kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan/Sub Kegiatan,
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan/Sub Kegiatan,
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan/Sub Kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
3. Rencana tindak lanjut. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau merupakan penjabaran perencanaan tahunan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau Tahun 2019-2024. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau tahun 2022 (N-2) dan perkiraan target tahun 2023 (N-1).

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau selama tahun 2022 dan perkiraan target tahun 2023.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan capaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun pertama Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022 mengacu pada Tabel T-C.29 Permendagri No 86 Tahun 2017 yang disajikan Tabel 2.1 di bawah ini

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2022 Provinsi Riau

Nama :Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Riau

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019 - 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	400	100	100	100	100	100	300	75
2.23.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	464 Orang	100 %	116 Orang	116 Orang	100	116 Orang	348 orang	75
2.23.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	116 Orang	116 Orang	116 Orang	116 Orang	100	116 Orang	348 Orang	75
2.23.01.1.05	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	Terwujudnya belanja pakaian dinas dan atributnya	2 Paket	0	0	0	0	1 Paket	1 Paket	50
2.23.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	2 Paket	0	0	0	0	1 Paket	1 Paket	50
2.23.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	16 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100	4 Paket	12 Paket	75
2.23.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	3 Paket	75
2.23.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	3 Paket	75

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.23.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	3 Paket	75
2.23.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	3 Paket	75
2.23.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan	75
2.23.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	46 Unit	18 unit	10 unit	10 unit	100	10 unit	38 Unit	83
2.23.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	2 Paket	0	0	0	0	1 Paket	1 Paket	50
2.23.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	56 Unit	18 Unit	18 Unit	18 Unit	100	10 Unit	46 Unit	82
2.23.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100	3 Laporan	9 Laporan	75
2.23.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan	75
2.23.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan	75
2.23.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan	75
2.23.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	188 Unit	47 unit	47 unit	47 unit	100	47 unit	141 unit	75
2.23.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	4 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	3 Unit	75
2.23.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	28 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	100	7 Unit	21 Unit	75
2.23.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	152 unit	38 unit	38 Unit	38 Unit	100	38 Unit	114 Unit	75

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.23.01.1.09.09	Sub KegiatanPemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	3 Unit	75
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan yang sesuai SNP	400	100	100	100	100	100	300	75
2.23.02.101	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Jumlah Perpustakaan Umum, Perpustakaan SMA/SMK/MA, perpustakaan khusus yang terkelola sesuai Standar Nasional Perpustakaan	68 Perpustakaan	34 Perpustakaan	5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	100	24 Perpustakaan	44 Perpustakaan	65
2.23.02.101.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah perpustakaan elektronik yang dipelihara dengan manajemen layanan TIK	44 Perpustakaan	10 unit	10 unit	10 Perpustakaan	100	12 Perpustakaan	34 Perpustakaan	77
2.23.02.101.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan yang dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	120 orang	60 unit	60 orang	60 orang	100	0	120 orang	100
2.23.02.101.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khusus yang dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	48 Perpustakaan	-	-	-	-	24 Perpustakaan	24 Perpustakaan	50
2.23.02.101.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikat tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah provinsi	100 Orang	-	-	-	-	50 Orang	50 Orang	50
2.23.02.101.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat daerah provinsi yang dikembangkan melalui peningkatan kualitas pelayanan	20 Layanan	-	-	-	-	20 Layanan	20 Layanan	100
2.23.02.101.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan	11.000 Eksemplar	1.500 Eksemplar	1.500 Eksemplar	1.500 Eksemplar	100	4.000 Eksemplar	7.000 Eksemplar	63

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.23.02.101.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah provinsi	5 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	-	5 Dokumen	100
2.23.02.102	Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan pembudayaan gemar membaca	6 Kab/Kota	3 Kab/Kota	3 Kab/Kota	3 Kab/Kota	100	-	6 Kab/Kota	100
2.23.02.102.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan Perpustakaan berbasis Inklusi Sosial di wilayah provinsi yang dikembangkan	6 Kab/Kota	3 Kab/Kota	3 Kab/Kota	3 Kab/Kota	100	-	6 Kab/Kota	100
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Jumlah OPD yang Sudah Melaksanakan Pengelolaan Arsip	33 OPD	48 OPD dan Kab/Kota	48 OPD dan Kab/Kota	48 OPD dan Kab/Kota	100	33 OPD	33 OPD	100
2.24.02.101	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Jumlah Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	15840 Berkas	-	-	-	-	7920 berkas	15840 Berkas	50
2.24.02.101.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah naskah dinas yang diciptakan dan digunakan	15840 berkas	-	-	-	-	7920 berkas	7920 Berkas	50
2.24.02.102	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Jumlah Pengelolaan Arsip Statis	33 OPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	33 OPD	33 OPD	100
2.24.02.102.02	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses	1050 Arsip	10 OPD	15 OPD	15 OPD	100	500 Arsip	500 Arsip	47
2.24.02.103	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Jumlah Pengguna Pelayanan Arsip SIKN	12.600 Orang	2.500 Pengguna	5.000 Pengguna	5.000 Pengguna	100	2.500 Pengguna	10.000 Pengguna	79
2.24.02.103.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	5.135 Pengguna	20 Arsip	15 OPD	15 OPD	100	2.500 Pengguna	2.500 Pengguna	48
2.24.02.103.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	4 Laporan	48 OPD	36 OPD	36 OPD	100	1 Laporan	3 Laporan	25

Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra Perangkat Daerah dari gambaran Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2022 Provinsi Riau, telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Riau dimana indikator kegiatan telah dibuat setiap tahunnya sebagai target kinerja OPD dan menjadi penunjang bagi pencapaian Renstra Provinsi. Dengan adanya indikator yang tidak tercapai pada tahun anggaran yang telah ditetapkan akan menimbulkan implikasi perlambatan dalam pencapaian target kinerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau dan kedepan diharapkan adanya inovasi percepatan dalam pencapaian terget kinerja tersebut dengan dukungan pengambil kebijakan serta adanya evaluasi Perubahan Renstra untuk penyesuaian pencapaian indikator target kinerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau. Untuk capaian Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 dapat dievaluasi dengan mengacu pada Permendagri 5889 Tahun 2021.

Realisasi Program/ Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja hasil/Keluaran yang direncanakan:

Tidak terdapat capaian program yang tidak memenuhi target pada tahun 2022 dan perkiraan capaian sampai dengan tahun berjalan.

2.1.2 Realisasi Program/ Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan:

Tabel 2.2 Realisasi Per Program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau Tahun 2022					
NO	URAIAN	ANGGARAN	BOBOT %	REALISASI	(%)
1.	1 (satu) Program Penunjang Urusan	27.473.078.911	97.71	26.261.809.316	95.59
2.	1 (satu) Program Urusan Perpustakaan	366.788.895	1.36	319,575,024	91.98
3.	1 (satu) Program Urusan Kearsipan	276,182,149	0.98	228,486,013	82.73
JUMLAH BELANJA		28.116.049.955	100	26.827.666.503	95.42

Program penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan indikator presentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan realisasi keuangan 95.42% dan Realisasi fisik 100%. Program ini dilaksanakan melalui 9 kegiatan dan 22 Sub kegiatan;

2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan:

Pada Program Pembinaan Perpustakaan Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi Sub Kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi dimana meningkatnya penerapan Standar Nasional Perpustakaan (SNP) yang ditargetkan 34 Perpustakaan sesuai kewenangan dan yang tercapai sebanyak 44 Perpustakaan yang

sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP) (121,49%), dimana jumlah perpustakaan yang sesuai kewenangan provinsi sebanyak 829 Perpustakaan.

Pada Program Pengelolaan Arsip terdapat peningkatan jumlah masyarakat yang menggunakan akses layanan kearsipan yang ditargetkan sebanyak 2.600 orang dan realisasinya mencapai 4.758 orang (183%)

2.1.4 Faktor-faktor Penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan untuk urusan perpustakaan adalah sebagai berikut :

- Jangkauan wilayah yang luas dan kesiapan sekolah-sekolah untuk mengikuti akreditasi.
- Penguatan tenaga perpustakaan dengan melakukan pembinaan dan sosialisasi baik secara webinar maupun langsung ke daerah.
- Advokasi ke Kepala Daerah selaku pengambil kebijakan untuk melaksanakan perpustakaan yang sesuai dengan Standart Nasional Perpustakaan (SNP).
- Kolaborasi stakeholder (Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan Perpustakaan Nasional RI untuk mendorong integrasi satu data satu agenda.
- Kolaborasi lintas organisasi kepustakawan (IPI, ATPUSI, FTBM, dsb untuk peningkatan kualitas layanan pada berbagai jenis perpustakaan.

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau

Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Dari gambaran Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023, telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Riau dimana berdasarkan indikator kegiatan telah ditetapkan target kinerja OPD dalam kerangka pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Dengan adanya indikator yang tidak tercapai pada tahun anggaran yang telah ditetapkan menimbulkan implikasi perlambatan dalam pencapaian target kinerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau, dan kedepan diharapkan adanya inovasi percepatan dalam pencapaian terget kinerja tersebut dengan dukungan pengambil kebijakan serta mencermati kembali sebagai masukan dalam penyusunan Renja tahun berikutnya.

2.1.6 Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu diambil Untuk Mengatasi Faktor-faktor Penyebab tersebut.

Dari uraian diatas maka kebijakan atau tindakan kedepan diharapkan adanya inovasi percepatan dalam pencapaian terget kinerja tersebut dengan dukungan pengambil kebijakan melalui pimpinan dengan dukungan anggaran.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Subbab Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ini berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Indikator kinerja setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau Tahun 2023 juga memuat evaluasi tahun sebelumnya yakni Tahun 2021. Dalam evaluasi terhadap Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau Tahun 2021 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Kebijakan Perencanaan Program & Kegiatan.
2. Pelaksanaan Rencana Program & Kegiatan
3. Hasil Rencana Program & Kegiatan Pada evaluasi penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau Tahun 2021.

Adapun kinerja pelayanan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau pada tahun anggaran 2021 terjadi perubahan sejalan dengan adanya Pandemi Covid-19 yang terjadi di dunia dan Indonesia dimulai dari Maret 2020 hal ini berpengaruh kepada Indikator Kinerja Utama yang terdiri dari Akreditasi Perpustakaan, Jumlah pengunjung dan Indek Manajemen Kearsipan telah dibuat pada Target RENSTRA SKPD, Realisasi Capaian, dan Proyeksi. Hal ini sejalan dengan penyesuaian target kinerja Penyelenggaraan Pemerintah pada perubahan RKPD 2021. Sedangkan Target Renstra lainnya, dengan harapan dapat dicapai pada tahun yang akan datang dan pandemi covid-19 telah berakhir dan dukungan anggaran dapat dioptimalkan.

Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau dapat dilihat pada Tabel T-C.30. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang disajikan pada Tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK (PP-6/08)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Perpustakaan Tingkat Provinsi Yang Sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP)	44		4.70	5.31	8.20	8.20	5.71	5.31	8.20	8.20	
2	Persentase masyarakat yang menggunakan akses layanan kearsipan	2.600		2.600	3.000	3.452	3.452	4.758	3.000	3.452	3.452	

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau mempunyai 2 (dua) urusan yaitu Urusan Bidang Perpustakaan dan Urusan Bidang Kearsipan yang dituangkan dalam sasaran dinas yang berasal dari tujuan Organisasi Perangkat Daerah untuk mendukung visi Gubernur terpilih sesuai dengan Misi yang telah ditetapkan pada RJPMD Tahun 2024 yaitu **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Prima berbasis Teknologi Informasi** dengan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perpustakaan dengan indikator persentase perpustakaan tingkat provinsi yang sesuai Standar Nasional Perpustakaan.

Meningkatnya Penerapan Standar Nasional Perpustakaan dengan indikator kinerja Persentase Perpustakaan yang sesuai SNP dengan formulasi perhitungan Jumlah Perpustakaan memperoleh SNP dibagi jumlah perpustakaan yang menjadi kewenangan Provinsi dikali 100%.

Jumlah Perpustakaan yang sudah memenuhi SNP sampai dengan tahun 2021 sebanyak 34 Perpustakaan yang terakreditasi dan pada tahun 2022 target penambahan Perpustakaan sesuai SNP sebanyak 5 Perpustakaan dan realisasinya sebanyak 10 perpustakaan, jadi jumlah perpustakaan samapai dengan tahun 2022 adalah 34 perpustakaan ditambah 10 perpustakaan sehingga menjadi 44 Perpustakaan dengan jumlah perpustakaan yang menjadi kewenangan sebanyak 829 perpustakaan, dengan target 5.31 % dan realisasi sebesar 5.31% dengan Formulasi perhitungan sebagai berikut $(44/829 \times 100\%) = 5.31\%$. Target untuk tahun 2022 adalah sebesar 4.70%, dimana capaian kinerja untuk tahun 2022 adalah realisasi dibagi target dikali 100% $(5.31/4.70 \times 100\%) = 122.12 \%$.

2. Meningkatkan Akses Layanan Kearsipan dengan indikator Persentase masyarakat yang menggunakan akses layanan kearsipan.

Persentase masyarakat yang menggunakan Akses Layanan Kearsipan dengan Formulasi Jumlah Kunjungan Masyarakat Menggunakan Layanan Kearsipan berdasarkan Data BPS Jumlah penduduk usia 15 – 69 Tahun (4.496.006) di kali 100%. Target untuk tahun 2022 adalah 0.058% untuk $(2.600 \text{ orang} / 4.496.006 \text{ orang} \times 100\%)$ dan realisasi sebanyak 4.758 Orang pengguna layanan, dengan perhitungan target kinerja $(4.758 \text{ orang} / 4.496.006 \text{ orang} \times 100\%) = 189.66\%$. Capaian Kinerja sebesar 183% dengan perhitungan realisasi dibagi target dikali 100% $(4.758 \text{ orang} / 2.600 \text{ orang} \times 100\%) = 183\%$.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran, dapat dilakukan dengan beberapa cara. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau memandang bahwa cara pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilaksanakan melalui pendekatan strategi dan kebijakan.

Sebagai sebuah rangkaian cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi operasional yang dapat diimplementasikan diwujudkan melalui garis-garis kebijaksanaan, rangkaian program, dan kegiatan yang berkelanjutan dan

berkesinambungan. Setiap strategi operasional tersebut menunjukkan adanya keterkaitan dan sekuensi yang jelas sebagai suatu sistem operasional Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau.

2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Hal Kritis Yang Terkait Dengan Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan antara lain sebagai berikut :

- a. Persentase Perpustakaan Tingkat Provinsi yang sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP), dengan Indikator Kinerja Jumlah Perpustakaan yang memperoleh akreditasi.
- b. Hasil Nilai Pengawasan Kearsipan dengan Indikator Persentase Masyarakat yang menggunakan Akses Layanan Kearsipan.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

2.3.2.1 Permasalahan

Adapun masalah pokok penyelenggaraan tugas kepastakaan dan kearsipan adalah sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya kualitas perpustakaan
 - Masih kurangnya sarana dan prasaran perpustakaan yang memadai, dengan akar masalah Kurangnya pembaharuan koleksi perpustakaan dan Kurangnya Pemeliharaan terhadap kelengkapan peralatan pendukung maupun penunjang perpustakaan
 - Masih rendahnya kompetensi SDM pengelola perpustakaan, dengan akar masalah Kurangnya pendidikan dan pelatihan SDM secara berkala/periodik (*capacity building*)
 - Masih rendahnya minat dan budaya baca masyarakat dengan akar masalah kurangnya instensitas Kerjasama kunjungan ke perpustakaan kepada Lembaga atau instansi serta kurangnya sosialisasi dan promosi layanan perpustakaan melalui pameran dan layanan perpustakaan keliling.
 - Masih rendahnya layanan digitalisasi perpustakaan dan dan pemanfaatan informasi teknologi dengan akar masalah kurangnya inovasi layanan dan penggunaan informasi teknologi yang belum optimal.
- b. Masih rendahnya akses layanan arsip
 - Belum terpenuhinya standar kompetensi SDM layanan kearsipan dengan akar masalah kurangnya Pendidikan dan pelatihan SDM secara berkala/periodik (*capacity building*).

- Masih rendahnya pembinaan dan pengembangan layanan informasi kearsipan dengan akar masalah kurangnya sosialisasi dan bimbingan teknis terhadap penguatan kelembagaan kearsipan daerah.
- Masih rendahnya pemanfaatan informasi teknologi terhadap layanan kearsipan dengan akar masalah rendahnya pengetahuan SDM terhadap pemanfaatan teknologi sebagai media menuju arsip digital.
- Masih kurangnya sarana dan prasarana kearsipan yang memadai dengan akar masalah terbatasnya kapasitas depot arsip yang sesuai standar.

1.3.1.1. Hambatan

Adapun hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Hambatan penyelenggaraan keperpustakaan

- Kurangnya sarana dan prasarana layanan perpustakaan
- Kurangnya tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kemampuannya
- Kurangnya jumlah bahan Pustaka
- Kurangnya layanan teknologi informasi perpustakaan

b. Hambatan penyelenggaraan kearsipan

- Kurangnya pengelolaan arsip dinamis
- Kurangnya pengelolaan arsip statis
- Kurangnya penggunaan pelayanan arsip SIKN

2.3.3 Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, Terhadap Capaian Program Nasional/Internasional dan Sustainable Development Goals (SDGs)

2.3.3.1 Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Dalam rangka mengimplementasikan pembangunan daerah sesuai dengan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019–2024 adalah : Visi “***Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)***”

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau berdasarkan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban terhadap upaya pencapaian misi ke-5 (lima) Provinsi Riau yaitu “***Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Prima berbasis Teknologi Informasi***” dengan tujuan Meningkatkan Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel serta indikator Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks) sedangkan sasaran :

- Meningkatnya penerapan Reformasi birokrasi dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)

- Meningkatnya penerapan *egovernment* dengan indikator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

2.3.3.2 Dampak Terhadap Capaian Program Nasional

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau selain berpedoman pada RPJMD, juga berpedoman pada Renstra K/L yaitu Perpustakaan Nasional dan Arsip Nasional, yang mana K/L juga mengacu kepada RPJMN Tahun 2019-2024, dikarenakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau Memiliki Dua Urusan Yaitu Urusan Perpustakaan dan Urusan Kearsipan.

Untuk mensinkronkan Program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau, Maka Renstra K/L menjadi salah satu Pedoman untuk pembuatan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau untuk mensinkronisasikan Program Kegiatan Nasional, dan Juga Mengacu Pada Arah Kebijakan, strategis, Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan K/L serta Prioritas Nasional yang menjadi fokus dalam melaksanakan kegiatan. Adapun Permasalahan Pelayanan dapat dilihat pada tabel 2.4 dibawah ini :

Tabel 2.4
Renstra Perpustnas RI dan ANRI
Penyelenggaraan Urusan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan

No	Visi/Misi KL	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran
1. Renstra Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Tahun 2020-2024)				
	Visi : Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui penguatan budaya literasi Misi : Meningkatkan Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan, Pelayanan Prima Perpustakaan, dan Pelestarian Bahan Pustaka dan Naskah Nusantara	1. Tingkat Ketercukupan koleksi. Secara nasional, rasio ketercukupan jumlah koleksi perpustakaan kurang mencukupi. 2. Tingkat Ketercukupan Tenaga Perpustakaan. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan umum adalah 1 : 2500 yaitu 1 orang tenaga perpustakaan melayani 2500 orang penduduk. 3. Tingkat pemanfaatan perpustakaan/pemustaka. Kunjungan pemustaka dapat mencerminkan tingkat pemanfaatan perpustakaan, yang dapat dilihat dari jumlah kunjungan pemustaka per hari dibagi dengan jumlah penduduk	Penguatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas dengan pemanfaatan perpustakaan bagi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat untuk meningkatkan kesejahteraan ditandai dengan meningkatnya nilai budaya literasi dari 55,03 (baseline 2019) menjadi 71,0 tahun 2024	Terwujudnya pembangunan literasi dan kegemaran membaca masyarakat ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan literasi dan kegemaran membaca

2. Renstra Arsip Nasional Republik Indonesia (Tahun 2020-2024)				
	Visi : Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong Misi : 1. Memberdayakan arsip sebagai tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan 2. Memberdayakan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi 3. Memberdayakan arsip sebagai alat bukti yang sah 4. Melestarikan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa dalam kerangka NKRI 5. Memberikan akses arsip kepada publik untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah kearsipan demi kemaslahatan bangsa	1. Kelembagaan dan Kebijakan/Regulasi. Tingkat kepatuhan kementerian/lembaga/daerah/lembaga pendidikan/perusahaan dan masyarakat/publik terhadap kebijakan kearsipan masih rendah 2. Manajemen kearsipan. Manajemen kearsipan (arsip dinamis maupun arsip statis) masih belum optimal baik dalam rangka mempercepat proses reformasi birokrasi, mitigasi dan perlindungan dari sengketa hukum, perlindungan asset negara, maupun kebutuhan-kebutuhan lain untuk kepentingan pembangunan 3. Penyelamatan, pemanfaatan dan pelayanan arsip. Penyelamatan dan perlindungan arsip statis sebagai memori kolektif yang menggambarkan <i>mosaic</i> sejarah bangsa yang lengkap belum terlaksana secara maksimal, masih banyak khazanah bangsa yang masih tercecer diberbagai tempat didalam maupun luar negeri, bahkan rusak akibat bencana yang sering terjadi 4. Kebutuhan SDM kearsipan. Penyelenggaraan kearsipan dalam setiap organisasi dan masyarakat maupun individu yang meluas di seluruh Indonesia tentunya sangat membutuhkan SDM yang jumlahnya mencukupi dan kualitasnya memadai. 5. Pengembangan <i>E-Arsip</i> dan <i>Big Data</i> Kearsipan. Dalam rangka mewujudkan tata kelola administrasi pemerintahan, efisiensi, dan	Meningkatnya pemanfaatan arsip untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan ketahanan budaya bangsa yang tangguh dengan indikator indeks pemanfaatan arsip.	1. Meningkatnya kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan dengan indikator indeks kepatuhan terhadap kebijakan kearsipan 2. Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya secara nasional dengan indikator indeks ketersediaan arsip 3. Meningkatnya pelayanan informasi kearsipan yang prima dengan indikator indeks pelayanan informasi kearsipan 4. Terwujudnya tata kelola yang baik untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis di ANRI dengan indikator indeks reformasi birokrasi

		menyiapkan fondasi manajemen pengetahuan pemerintah termasuk dalam mengantisipasi penyelamatan dan perlindungan arsip secara elektronik, maka pengembangan <i>e-arsip</i> (<i>SPBE</i> bidang kearsipan) dan <i>big data</i> kearsipan menjadi isu strategis yang harus dijadikan dasar untuk mengembangkan kearsipan secara nasional. 6. Peran kearsipan dalam pemindahan ibukota negara baru. Kebijakan pemerintah yang akan memindahkan ibukota negara (IKN) ke Kalimantan Timur, akan membawa konsekuensi yang sangat besar dibidang kearsipan. 7. Darurat Pandemi Covid-19. Tahun 2020 menjadi tahun yang berat dilihat dari berbagai aspek kehidupan kenegaraan, pemerintahan, dan pembangunan dibanyak negara disebabkan oleh adanya darurat kesehatan terburuk dalam sejarah modern dalam penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID 19).		
--	--	---	--	--

Didalam rangka pencapaian kinerja pembangunan mulai dari pusat sampai daerah dilakukan berkolaborasi dan bersinergi untuk memajukan urusan perpustakaan dan kearsipan sesuai dengan kewenangan masing-masing urusan, untuk urusan perpustakaan pada implementasi pembudayaan gemar membaca masih terdapat perbedaan disebabkan sarana dan prasarana pendukung serta SDM pengelola perpustakaan yang belum memadai sehingga pencapaian dalam pembudayaan gemar membaca belum optimal di masing-masing daerah. Untuk urusan kearsipan yaitu dengan terintegrasinya Pengembangan Sistem Kearsipan Nasional (SKN) Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Pembentukan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) sampai ke daerah membutuhkan sarana dan prasarana serta SDM yang handal untuk mengimplementasikannya karena untuk urusan kearsipan sudah termasuk dalam salah satu penilaian indeks Reformasi Birokrasi yang dimana daerah harus memperkuat indeks manajemen kearsipan yang akan dilakukan audit eksternal dan internal oleh ANRI.

2.3.2.3 Terhadap Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)

Pendidikan berkualitas menjadi tujuan keempat dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Terdapat sepuluh target di tingkat global yang digunakan untuk mengukur kemajuan dan keberhasilan negara dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Pada bab ini, terdapat 10 indikator yang disajikan untuk menghitung capaian tujuan kelima. Secara umum, di tahun 2021 Riau mengalami perkembangan capaian pada tujuan keempat. Hal ini ditandai dengan meningkatnya partisipasi sekolah baik pada jenjang pendidikan formal dan non formal dari jenjang SD hingga Perguruan Tinggi. Pegetahuan keterampilan teknologi informasi yang diperoleh juga semakin meningkat. Hal ini tentunya akan meningkatkan kualitas pendidikan. Bahkan, dari sisi kualitas penyelenggaraan pendidikan, terjadi peningkatan penyediaan sarana prasarana di sekolah yang mendukung proses belajar, diantaranya akses listrik, komputer, internet, air minum, sanitasi, dan sarana cuci tangan. Hal ini juga meningkatkan kebersihan dan tingkat kesehatan peserta didik. Ditambah pula semakin meningkatnya kualitas tenaga pendidik.

INDIKATOR 4.1.1.(A) PROPORSI ANAK-ANAK DAN REMAJA DI: (I) KELAS 5 (B) KELAS 8, DAN (C) USIA 15 TAHUN YANG MENCAPAI SETIDAKNYA TINGKAT KEMAHIRAN MINIMUM DALAM: (I) MEMBACA, (II) MATEMATIKA

Indikator ini mengukur capaian belajar siswa dalam kompetensi dasar akademik yang meliputi membaca (literasi) dan matematika (numerasi). Capaian ini menggambarkan kualitas pendidikan dasar (SD dan SMP) di Indonesia. Capaian indikator ini dapat diukur melalui dua sumber data: a. Pertama, capaian kompetensi minimum untuk siswa kelas 5 dan kelas 8 diukur dengan menggunakan hasil AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum. AKM dirancang dan diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Perpustakaan dan kearsipan dan digunakan untuk mengukur capaian siswa menjelang akhir jenjang pendidikan, dalam hal ini SD/ sederajat dan SMP/ sederajat. b. Kedua, hasil tes PISA (Programme for International Student Assessment) digunakan untuk mengukur kemampuan literasi dan numerasi siswa usia 15 tahun di kelas 9 ataupun kelas 10. PISA adalah survei internasional yang diselenggarakan oleh OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) untuk mengukur kualitas pendidikan suatu negara melalui uji kemampuan di bidang literasi, numerasi, dan sains. Berdasarkan hasil analisa data di atas, kemampuan siswa kemudian dibagi kedalam dua kelompok: 1) siswa di bawah standar minimum; dan 2) siswa yang mencapai atau melampaui standar minimum.

2.3.4 Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam meningkatkan pelayanan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau dihadapkan kepada peluang dan tantangan dengan keberadaan Kelembagaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di 12 (dua belas) Kabupaten/Kota se- Provinsi Riau.

Urusan Perpustakaan :

Pada urusan Perpustakaan Dalam upaya meningkatkan mutu layanan perpustakaan Pemerintah Provinsi Riau telah melakukan berbagai upaya, diantaranya dengan melakukan pengembangan layanan perpustakaan guna menumbuhkan kembangkan budaya Gemar Membaca kepada seluruh lapisan masyarakat serta sejalan dengan Program Nasional (PN) Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Keberhasilan suatu lembaga perpustakaan bukan hanya dilihat dari sumber daya manusianya saja, akan tetapi ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana yang tentunya merupakan penentu dari peningkatan jumlah pemustaka yang berkunjung, yang didukung adanya Program dari Lembaga Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Adanya Arahan Prioritas Nasional Tentang Strategi Pengembangan Perpustakaan Ditingkat Provinsi, Kab/Kota Sampai dengan Tingkat Desa, Adanya Dana Dekonsentrasi Perpustakaan dan Dana Alokasi Khusus (DAK); Untuk mewujudkan tercapainya kinerja layanan perpustakaan maka harus terpenuhi :

- meningkatnya pengunjung perpustakaan dengan terpenuhinya jumlah kunjungan, peningkatan diversifikasi layanan perpustakaan, jumlah jenis layanan perpustakaan, meningkatnya sarana dan prasarana layanan perpustakaan dan jumlah pemenuhan sarana dan prasarana pada setiap layanan;
- Meningkatnya budaya gemar membaca dengan terpenuhinya Persentase pemenuhan implementasi pembudayaan gemar membaca, meningkatnya promosi perpustakaan, jumlah promosi gemar membaca, meningkatnya pengembangan bahan perpustakaan dan jumlah koleksi perpustakaan;
- Meningkatnya Pelestarian Bahan Perpustakaan dan naskah kuno dengan tercapainya meningkatnya alih media bahan perpustakaan dan naskah kuno, meningkatnya preservasi atau perawatan fisik bahan perpustakaan dan naskah kuno;
- Meningkatnya pengembangan koleksi budaya etnis nusantara dengan terpenuhinya meningkatnya penelusuran koleksi budaya etnis, meningkatnya koleksi budaya etnis secara digital;
- Meningkatnya serah simpan KCKR koleksi daerah dengan terpenuhinya meningkatnya kerjasama dengan penerbit, lembaga dan perseorangan, meningkatnya pengelolaan koleksi deposit;
- Meningkatnya penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah dengan terpenuhinya meningkatnya data katalog induk daerah, meningkatnya data Bibliografi Daerah;
- Peningkatan Kelembagaan Perpustakaan dengan terpenuhinya jumlah perpustakaan yang diakreditasi, meningkatnya pembinaan kelembagaan perpustakaan, jumlah perpustakaan yang dibina, meningkatnya mutu kelembagaan perpustakaan dan jumlah perpustakaan yang mengikuti lomba pengelolaan perpustakaan;

- Peningkatan kapasitas SDM perpustakaan dengan terpenuhinya jumlah pengelola pemustaka yang meningkatkan kompetensi, meningkatnya kompetensi SDM Perpustakaan, jumlah SDM Perpustakaan, meningkatnya jenis kompetensi SDM Perpustakaan dan jumlah jenis peningkatan kompetensi perpustakaan.

Urusan Kearsipan :

Sedangkan urusan Kearsipan untuk menjamin tercipta dan ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, terwujudnya pengelolaan arsip yang andal, perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat, keselamatan dan keamanan arsip, keselamatan aset nasional serta meningkatkan kualitas pelayanan sebagai implementasi dari pelayanan yakni pencapaian Indeks Manajemen Kearsipan dengan kategori penilaian yang telah ditetapkan oleh ANRI. Adanya Program SIKN/JIKN untuk Pelayanan Informasi Kearsipan Kepada Masyarakat (*stake holder*), Masyarakat semakin mengerti akan pentingnya arti arsip sebagai sumber informasi dalam pembangunan daerah dan pertanggungjawaban kepemilikan arsip, Adanya Regulasi dari Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia Tentang Tata Kelola Kearsipan; Untuk mewujudkan tercapainya kinerja urusan kearsipan maka harus terpenuhi :

- Peningkatan layanan informasi, pendayagunaan dan perlindungan akses arsip dengan terpenuhinya jumlah arsip yang dilayankan dan dapat diakses, meningkatnya layanan arsip, jumlah layanan arsip yang dilayani, meningkatnya layanan digital informasi arsip dan jumlah arsip yang dilayankan dan dapat diakses.
- Peningkatan pembinaan kearsipan internal dengan terpenuhinya persentase OPD yang dibina, meningkatnya pengelolaan arsip dinamis, jumlah OPD yang telah mengelola arsip sesuai NSPK, meningkatnya prasana dan sarana pengelolaan arsip di OPD dan jumlah OPD yang telah memenuhi standart prasana dan sarana kearsipan;
- Peningkatan pembinaan kearsipan eksternal dengan terpenuhinya persentase lembaga kearsipan eksternal yang dibina, meningkatnya pembinaan Lembaga Kearsipan Daerah (LKD), jumlah LKD yang meningkat Indeks Manajemen Kearsipan, meningkatnya pembinaan lembaga pencipta arsip dan jumlah lembaga pencipta arsip lainnya yang dibina;
- Peningkatan akuisisi arsip dengan terpenuhinya jumlah pencipta arsip yang diakuisisi dan yang menyerahkan arsip keLembaga Kearsipan Daerah (LKD), meningkatnya akuisisi arsip statis, jumlah pencipta arsip yang diakuisi arsip statisnya, meningkatnya pengelolaan arsip inaktif perangkat daerah dan jumlah pencipta arsip yang menyerahkan arsip inaktif dengan retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
- Peningkatan perawatan arsip LKD dengan terpenuhinya jumlah arsip yang dilakukan pengolahan, perawatan dan pemeliharaan, meningkatnya pengolahan arsip, jumlah arsip statis dan arsip inaktif dengan retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun yang diolah, meningkatnya perawatan arsip statis LKD, jumlah arsip statis LKD yang

dilakukan perawatan, meningkatnya pemeliharaan prasarana dan sarana arsip LKD dan jumlah prasana dan sarana arsp LKD yang terpelihara.

2.3.5 Formulasi Isu-isu Penting

Penentuan Isu-isu Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau

Dalam menentukan isu-isu strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau merumuskan ke dalam 2 (dua) urusan sebagai berikut :

Isu-isu Strategis Urusan Perpustakaan :

Pada urusan Perpustakaan isu-isu strategis yang muncul adalah adanya perkembangan kemajuan Teknologi dan Industri generasi 4.0 terjadinya pergeseran paradigma masyarakat dalam memanfaatkan layanan perpustakaan berupa transformasi perpustakaan dari manual menjadi digital. Dan perpustakaan sebagai pusat kegiatan masyarakat dan ruang terbuka, serta menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan pendapatannya.

Adapun yang menjadi isu-isu yang akan dihadapi dimasa yang akan datang terhadap urusan perpustakaan antara lain :

1. Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi yang profesional dalam menunjang perpustakaan yang modren.
2. Penyediaan sarana dan akses layanan perpustakaan yang mudah dan dekat dengan masyarakat.
3. Pemenuhan koleksi yang berkelanjutan.
4. Perubahan mind set pengelola perpustakaan yang lebih profesional.

Isu-isu Strategis Urusan Kearsipan :

Sedangkan urusan Kearsipan isu-isu strategis yang akan dihadapi adalah kemudahan dalam proses adminstrasi menggunakan kemajuan teknologi e-goverment berupa Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yang akan memudahkan dalam pengelolaan tata kelola kearsipan secara baik dan baku serta tersusun dengan rapi, sehingga mudah untuk dipergunakan kembali apabila diperlukan. Serta perlu menanamkan kepada setiap individu bahwa arsip itu sangat penting bagi kehidupan sehari-hari.

Adapun yang akan menjadi isu-isu urusan Kearsipan antara lain :

1. Pengintegrasian pengelolaan tata kearsipan pemerintah sesuai tingkatan berbasis elektronik.
2. Adanya kesepahaman dalam penerapan tata kelola kearsipan berbasis elektronik mulai dari pimpinan sampai pelaksana.
3. Perlu adanya regulasi yang menjadi pedoman pelaksanaan tata kelola kearsipan berbasis elektronik.
4. Sarana dan Prasarana pendukung untuk mewujudkan tata kelola kearsipan yang profesional (Gedung, depot arsip, komputer, internet).

5. Adanya pengawasan berupa penilaian Kearsipan Eksternal pada Lembaga Kearsipan Daerah dan Pengawasan Internal pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 dilakukan dengan maksud untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan/sub kegiatan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan kinerja pencapaian target yang ada dan telah disusun dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Selain itu review ini didasarkan tingkat kinerja yang dicapai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/prioritas dan pagu indikatif untuk Dinas Perpustakaan dan kearsipan.

Proses yang dilakukan dalam review ini meliputi kegiatan sebagai berikut :

1. Identifikasi prioritas program dan kegiatan yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD.
2. Menentukan indikator kinerja program/kegiatan dengan cara membandingkan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan dengan hasil analisis yang dilakukan pada tahap- tahap sebelumnya.
3. Menyajikan hasil analisis dalam bentuk matrik tabel, dengan menempatkan program/kegiatan yang sama pada garis yang sama.
4. Melakukan pengecekan apakah program/kegiatan prioritas telah termuat dalam rancangan awal RKPD atau belum.
5. Identifikasi program/kegiatan yang sesuai dan tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
6. Menentukan program dan kegiatan lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, tolok ukur atau target sasaran program/ kegiatan dan pagu indikatif/besaran dana yang dibutuhkan dan dialokasikan untuk setiap program/kegiatan.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD secara lengkap mengacu pada Tabel T-C.31 Permendagri 86 Tahun 2017 yang disajikan pada Tabel 2.5 dibawah ini :

Tabel.2.5
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Riau

N0	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				25.977.443.066					31.107.503.133	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kota Pekanbaru	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	24.773.616.637	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kota Pekanbaru	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	28.542.078.771	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pekanbaru	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Persen	19.575.155.166	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pekanbaru	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Persen	19.928.068.029	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekanbaru	ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	116 orang	19.575.155.166	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekanbaru	ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	116 orang	19.928.068.029	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pekanbaru	Jumla Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4 Paket	743.835.071	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pekanbaru	Jumla Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4 Paket	1.615.885.181	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	68.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	68.832.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	120.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	636.723.309	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	130.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	221.250.000	
	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Kota Pekanbaru	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	1 Paket	125.835.071	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Kota Pekanbaru	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	1 Paket	258.469.872	
	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Kota Pekanbaru	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 Laporan	300.000.000	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Kota Pekanbaru	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 Laporan	430.610.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pekanbaru	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10 Unit	225.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pekanbaru	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10 Unit	329.930.013	
	Pengadaan Mebel	Kota Pekanbaru	Jumlah Paket mebel yang disediakan	1 paket	100.000.000	Pengadaan Mebel	Kota Pekanbaru	Jumlah Paket mebel yang disediakan	1 paket	100.029.950	Kursi putar bulat untuk pemustaka
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekanbaru	Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	10 unit	125.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekanbaru	Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	10 unit	229.900.063	Komputer, Infokus, Scanner, Printer, CCTV, Drone, Print Head Print Barcode
	Penyediaaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekanbaru	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	3.697.296.400	Penyediaaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekanbaru	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	4.215.272.498	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp)	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekanbaru	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	10.000.000			Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	10.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pekanbaru	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	1 Laporan	1.387.296.400	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Saya Air dan Listrik	Kota Pekanbaru	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	1 Laporan	1.707.991.464	Terjadinya kenaikan tagihan listrik karena layanan ekstra sabtu dan minggu
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	2.300.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	2.497.281.034	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekanbaru	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47 Unit	532.330.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekanbaru	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47 Unit	2.452.923.050	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan	Kota Pekanbaru	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	1 unit	188.300.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan	Kota Pekanbaru	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	1 unit	44.030.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pekanbaru	Jumlah kendaraan dinas operasinal atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	7 unit	44.030.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pekanbaru	Jumlah kendaraan dinas operasinal atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	7 unit	188.300.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Kota Pekanbaru	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	38 unit	150.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Kota Pekanbaru	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	38 unit	524.860.000	Perbaikan robotik scanner, service AC dan service komputer
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Kota Pekanbaru	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara	1 unit	150.000.000	Pemeliharaan/Reahabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Kota Pekanbaru	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara	1 unit	1.695.733.050	Rehab gedung arsip dan gedung sekretariat
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				615.750.000					1.977.347.933	
	ROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Kota Pekanbaru	Indeks Kepuasan Masyarakat	24 Perpustakaan	615.750.000	ROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Kota Pekanbaru	Indeks Kepuasan Masyarakat	24 Perpustakaan	1.977.347.933	
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Kota Pekanbaru	Peningkatan Jumlah Perpustakaan Umum, Perpustakaan SMA/SMK/MA, Perpustakaan Khusus yang terkelola sesuai standar Nasional Perpustakaan	24 Perpustakaan	615.750.000	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Kota Pekanbaru	Peningkatan Jumlah Perpustakaan Umum, Perpustakaan SMA/SMK/MA, Perpustakaan Khusus yang terkelola sesuai standar Nasional Perpustakaan	24 Perpustakaan	1.977.347.933	
	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Perpustakaan Soeman Hs Provinsi Riau	Jumlah perpustakaan elektronik yang dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK	12 Perpustakaan	100.000.000	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Perpustakaan Soeman Hs Provinsi Riau	Jumlah perpustakaan elektronik yang dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK	12 Perpustakaan	137.603.274	Pendampingan mencapai ISO 20000
	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khusus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	24 Perpustakaan	140.000.000	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khusus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	24 Perpustakaan	140.000.000	Pembinaan SDM atau tenaga pustaka se Provinsi Riau

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp)	
	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Perpustakaan Soeman Hs Provinsi Riau	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	50 Orang	100.000.000	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Perpustakaan Soeman Hs Provinsi Riau	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	50 Orang	100.000.000	Bimtek SDM (pustakawan)
	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Kabupaten/Kota di Provinsi Riau	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan	20 Layanan	135.750.000	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Kabupaten/Kota di Provinsi Riau	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan	20 Layanan	823.922.973	Layanan ekstra, layanan pusling, seragam layanan
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Perpustakaan Soeman Hs Provinsi Riau dan Perpustakaan Kab/Kota	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	4000 eksemplar	140.000.000	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Perpustakaan Soeman Hs Provinsi Riau dan Perpustakaan Kab/Kota	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	4000 eksemplar	775.821.686	Kamera digital alih media naskah kuno
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN										
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		Jumlah OPD yang Sudah Melaksanakan Pengelolaan Arsip	33 OPD	588.076.429	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		Jumlah OPD yang Sudah Melaksanakan Pengelolaan Arsip	33 OPD	588.076.429	
	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	7.920 Berkas	186.283.900	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	7.920 Berkas	186.283.900	
	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	7.920 Berkas	186.283.900	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	7.920 Berkas	186.283.900	
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Perangkat Daerah/Institusi/Perseorangan	Jumlah Pengelolaan Arsip Statis	33 OPD	227.608.455	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Perangkat Daerah/Institusi/Perseorangan	Jumlah Pengelolaan Arsip Statis	33 OPD	227.608.455	
	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Depo Arsip Provinsi Riau	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses	550 Arsip	227.608.455	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Depo Arsip Provinsi Riau	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses	550 Arsip	227.608.455	
	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau	Jumlah Pengguna Pelayanan Arsip SIKN	2.600 Pengguna	174.184.074	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau	Jumlah Pengguna Pelayanan Arsip SIKN	2.600 Pengguna	174.184.074	
	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Lembaga Kearsipan Provinsi Riau	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	2.600 Pengguna	62.855.983	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Lembaga Kearsipan Provinsi Riau	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	2.600 Pengguna	62.855.983	
	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	1 Laporan	111.328.091	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	1 Laporan	111.328.091	Peningkatan SDM arsiparis

2.4.3 Temuan Temuan Setelah Proses Review Ranwal RKPD

Temuan dari hasil review ranwal RKPD ditemui perbedaan sebagai berikut
Adapun penambahan pagu pada program, kegiatan dan sub kegiatan dari Rancangan Awal RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan terdapat pada :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada :
 - 1) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Sub Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 3) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 4) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya
 - d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya.

Dari uraian kegiatan dan sub kegiatan diatas adalah untuk menunjang operasional urusan perpustakaan dan urusan kearsipan untuk peningkatan kualitas Perpustakaan dan kualitas Kearsipan untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sesuai dengan Renstra tahun 2019-2024.

- b. Program Pembinaan Perpustakaan pada :
 - 1) Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi pada
 - a. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik

- b. Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
- c. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi
- d. Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
- e. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
- c. Program Pengelolaan Arsip pada :
 - 1) Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi
 - a. Sub Kegiatan Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
 - 2) Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi
 - a. Sub Kegiatan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis
 - 3) Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN
 - b. Sub Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi

Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan adalah:

- a. Pada Program Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan pada kegiatan Pengadaan Pengolahan Preservasi Koleksi Perpustakaan dengan Rancangan Awal RKPD target 7.000 eksemplar hal ini sesuai dengan kondisi koleksi yang ada saat ini yang kemungkinan rusak dan lain sebagainya untuk dilakukan perbaikan-perbaikan dengan dukungan anggaran dan Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian 10.000 eksemplar hal ini akan dicapai pada akhir pencapaian Renstra 2024.
- b. Pada Program Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan pada kegiatan Penelusuran digital Bahan Perpustakaan (*Centre of Excellent*) Koleksi Budaya Lokal se-Sumatera dengan Rancangan Awal RKPD target 2 Provinsi sedangkan Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian 5 Provinsi hal ini akan dicapai pada akhir pencapaian Renstra 2024.
- c. Program Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan pada kegiatan Pendampingan pengelolaan arsip Perangkat Daerah dengan Rancangan Awal RKPD target 5 OPD sedangkan Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian 10 OPD hal ini akan dicapai pada akhir pencapaian Renstra 2024.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Untuk Proses usulan program dan kegiatan usulan pemangku kepentingan diperoleh dari kegiatan forum perangkat daerah yang merupakan tahapan dari proses perancangan untuk menampung aspirasi baik yang berasal dari pemerintah Kabupaten/ Kota se-Provinsi Riau, OPD mitra di Pemprov Riau, Perguruan Tinggi , organisasi

kemasyarakatan mitra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta Pokok-pokok pikiran yang berasal dari anggota DPRD Provinsi Riau sesuai dengan kewenangan yang di atur oleh peraturan yang berlaku.

Sejalan dengan hal tersebut sesuai dengan program prioritas nasional dimana melalui Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dikembangkan program Transformasi perpustakaan berbasis Inklusi sosial yang bertujuan meningkatkan ekonomi masyarakat dengan meningkatnya pendapatan untuk kesejahteraan keluarga. Untuk Provinsi Riau pada tahun 2018 memperoleh ada 3 (tiga) Kabupaten sasaran program Transformasi perpustakaan berbasis Inklusi sosial yakni Kabupaten Siak, Kabupaten pelalawan, dan Kabupaten Kampar. Untuk tahun 2019 terdapat 2 (dua) Kabupaten Siak dan Kabuapten Kampar. Pada 2020 ada 3 (tiga) Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan san Kabupate Siak, tahun 2021 ada 3 (tiga) Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hulu dan Indragiri Hulu, tahun 2022 hanya 1 (satu) Kabupaten Bengkalis, tahun 2023ada 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hilir, Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kuantan Singingi.

Terkait usulan program dan kegiatan mendukung tugas fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau terkait dengan usulan pemangku kepentingan mengacu pada tabel T-C.32 Permendagri 86 Tahun 2017 yang disajikan pada Tabel 2.6 dibawah ini:

Tabel 2.6
Usulan Program Dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Provinsi Riau

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 2.23.02.1.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi 2.23.02.1.01.01 - Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Kota Pekanbaru	Jumlah perpustakaan elektronik yang dipelihara dengan manajemen layanan TIK	1 Paket	Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Kewenangan Daerah Provinsi untuk Urusan Perpustakaan adalah : Pembinaan Perpustakaan Daerah Provinsi sesuai kewenangan yaitu Perpustakaan SMA/SMK/ MA/Khusus yang terkelola sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
2	2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 2.23.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.23.01.1.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pekanbaru	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	1 Kegiatan	Pemasangan Paving Block pada Depo Arsip

- 2.5.1 Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan masyarakat tersebut diperoleh;
Untuk mendapatkan usulan program/kegiatan yang ada pada tabel di atas melalui Forum Perangkat Daerah (Forum PD) yang dilaksanakan pada OPD masing-masing yang terkait, dengan mengundang OPD Dinas Perpustakaan Kabupaten/Kota dan OPD mitra yang ada dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau serta Anggota DPRD Provinsi Riau, Ormas Mitra, forum literasi dan lain-lain.
- 2.5.2 Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
Pada dasarnya usulan tersebut sangat terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau, sehingga dapat diterima sebagai usulan program/kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat disamping adanya pengaruh globalisasi. Tuntutan tersebut merupakan hal yang wajar bahkan merupakan suatu kewajiban pemerintah untuk meresponnya dengan melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik demi salah satunya *Good Governance*.

Upaya untuk mewujudkan *Good Governance* tersebut, diantaranya adalah dengan jalan reformasi birokrasi dan penataan kelembagaan perangkat daerah yang diarahkan untuk terciptanya organisasi yang efisien, efektif, rasional dan profesional sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dasar utama penyusunan perangkat Kabupaten/Kota dalam bentuk organisasi adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Paradigma tersebut di atas berimplikasi pada penggabungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau sebagaimana mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, yang dijelaskan lebih lanjut bahwa Perpustakaan dan Kearsipan merupakan satu rumpun urusan yang diwadahi dalam Dinas.

Fungsi Perpustakaan dan Kearsipan berbobot sama strategis maupun urgennya sebagai urusan wajib penyelenggaraan pemerintahan, perpustakaan memiliki fungsi edukatif, informatif, riset kepentingan, rekrentif, penyimpanan dan pelestarian bahan perpustakaan, sedangkan kearsipan memiliki fungsi sebagai bahan pengambilan keputusan, sebagai alat bukti yang autentik, memori koleksi kolektif dan simpul pemersatu bangsa, referensi sejarah, kepentingan riset.

Sesuai dengan fungsi-fungsi tersebut di atas perpustakaan, dan kearsipan ingin mewujudkan masyarakat yang cerdas, peradaban, modern berkarakter serta pemerintahan yang bersih, transparan, bebas dari KKN melalui upaya penyelenggaraan perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi secara lebih berkualitas, efisien dan efektif. Selain itu Perpustakaan Nasional juga telah menjadi Prioritas Nasional, Perpustakaan Nasional juga telah bertransformasi menjadi layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang dimana Perpustakaan Nasional akan mendesain perpustakaan dan koleksinya untuk dimanfaatkan masyarakat optimal mungkin sehingga Perpustakaan dapat menjadi Ruang berbagi Pengalaman, Ruang Belajar yang Kontektual, dan Ruang Berlatih Keterampilan Kerja maka dengan begitu dapat meningkatkan kunjungan pemustaka ke perpustakaan, dapat

meningkatkan jumlah kemitraan dari berbagai lembaga, dan peningkatan masyarakat dalam kegiatan Perpustakaan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran perangkat daerah merupakan faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi Kepala Daerah. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi Kepala Daerah. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis dibidang Perpustakaan dan Kearsipan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perpustakaan dan kearsipan, disamping itu juga ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada Gubernur selaku wakil pemerintah pusat dalam rangka dekonsentrasi. Untuk itu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya, sebagaimana tergambar pada tabel 3.1 di bawah ini:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Kualitas Perpustakaan		Persentase Perpustakaan Tingkat Provinsi yang sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Persen	8,20 %
		Meningkatnya Penerapan Standar Nasional Perpustakaan	Persentase perpustakaan yang sesuai SNP	Persen	8,20 %
2	Meningkatkan Kualitas Manajemen Kearsipan		Hasil Nilai Pengawasan Kearsipan	Nilai	81,59
		Meingkatnya Akses Layanan Kearsipan	Persentase Masyarakat Menggunakan Akses Layanan Kearsipan	Persen	0,007%
			Jumlah Masyarakat yang menggunakan layanan kearsipan JIKN SIKN	Orang	3.542

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Sesuai analisis SWOT dan pembobotan masing-masing faktor internal dan eksternal, dengan hasil pemetaan SWOT pada posisi Strength (Kekuatan) – Opportunity (Peluang) maka dirumuskan tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau untuk tahun 2024 yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas perpustakaan dengan meningkatkan komponen dan indikator kunci standar nasional perpustakaan antara lain : sarana dan prasarana, Lokasi Strategis, kelengkapan koleksi, Sumber Daya Manusia, pengorganisasian bahan perpustakaan, tata kelola perpustakaan, peningkatan penggunaan IT dan pembinaan perpustakaan, sedangkan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau Meningkatnya Pelayanan Aksesibilitas dan Mutu Perpustakaan dengan rumusan meningkatkan jumlah layanan yang diberikan sesuai standar nasional perpustakaan untuk pelayanan berkualitas.
- b. Meningkatkan Kualitas Kearsipan dengan meningkatkan nilai hasil pengawasan kearsipan antara lain meliputi: Kebijakan, Pembinaan kearsipan, Pengelola arsip Inaktif dengan Retensi sekurang-kurangnya 10 Tahun, Pengelola Arsip statis, dan Sumber Daya Kearsipan sehingga akan mencapai sasaran Meningkatnya Tata Kelola Kearsipan dengan rumusan setiap perangkat daerah minimal perbidang mempunyai 1(satu) orang pengelola kearsipan. Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN dan Srikandi

3.3 Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan

3.3.1 Faktor-Faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program Dan Kegiatan

Adapun faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan/sub kegiatan adalah :

- 1. Pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah Provinsi Riau
- 2. Pencapaian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) bidang Urusan Kepustakaan dan Urusan Kearsipan
- 3. Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- 4. Target-target dan indikator sebagaimana Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Terkait dengan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah Provinsi Riau, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau mengampu pada dengan Misi 5 (lima) yakni :

“ Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Informasi”

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai pelayanan publik dibidang perpustakaan dan didang kearsipan untuk memudahkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi akan menerapkan Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang berbentuk aplikasi *Inlislite* untuk perpustakaan, SIKN dan JIKN untuk tata kelola kearsipan berbasis elektronik.

Sejalan dengan hal diatas program dan kegiatan yang telah disusun telah mengacu kepala Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

3.3.2 Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan/Sub Kegiatan Strategis:

Bedasarkan Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 telah digunakan Nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023, sehingga renja perangkat daerah tahun 2024 mengacu pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah ditetapkanb pada RKPD tersebut. Pemetaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau ke Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai permendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 sebagaimana lampiran.

Kebutuhan Pendanaan prioritas urusan perpustakaan dan urusan kearsipan pada renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau tahun 2024 adalah sebesar berikut :

Pagu anggaran sebesar Rp. 1.048.621.929 berasal dari PAD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024 terdiri dari :

- Pagu anggaran mendukung urusan bidang perpustakaan sebesar Rp. 546.488.000
- Sedangkan pagu anggaran mendukung urusan bidang kearsipan sebesar ~~Rp.~~ Rp. 502.133.929

Rekapitulasi Program dan Kegiatan Strategis Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel T-C.33. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang disajikan pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
(PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN STRATEGIS)

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						26.671.575.000,00							25.523.636.637,00	
2.	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah Perpustakaan yang memperoleh Akreditasi (Perpustakaan)				24.00	546.488.000,00					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ProvinsiRiau		615.750.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi						546.488.000,00	(Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat, RIAU)						615.750.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Tingkat Provinsi Yang Dikelola (Perpustakaan)				25.00									
			Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)		24	24	24		(Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat, RIAU)			24				
			Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan(Pembinaan SDM (tenaga pustaka se Provinsi Riau) (Perpustakaan)				24	140.000.000,00	(Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat, RIAU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Masyarakat se Provinsi Riau					
	2.23.02.1.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi					44.040.000,00	(Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat, RIAU)				ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Masyarakat se Provinsi Riau		100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan TingkatDaerah Provinsi (Orang)		50.00	50.00	50.00		(Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat, RIAU)			50.00				
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi (Bimtek SDM/Pustakawan) (Orang)						50	44.040.000,00	(Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat, RIAU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Masyarakat se Provinsi Riau						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.02.1.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						135.750.000,00	(Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat, RIAU)				ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Masyarakat se Provinsi Riau	20.00	135.750.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi (Layanan)		20.00	20.00	20.00		(Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat, RIAU)		ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Masyarakat se Provinsi Riau					
			Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Layanan Ekstra, layanan pusling, seragam layanan (Layanan)				20	135.750.000,00	(Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat, RIAU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Masyarakat se Provinsi Riau					
	2.23.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka						126.698.000,00	(Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat, RIAU)				ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Masyarakat se Provinsi Riau	4000	140.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Eksemplar)		4000	4000	4000		(Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat, RIAU)		ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Masyarakat se Provinsi Riau					
			Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka (camera digital, alih media naskah kuno) (Eksemplar)				4.000	126.698.000,00	(Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat, RIAU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Masyarakat se Provinsi Riau					
	2.23.02.1.01.0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik						100.000.000,00	(Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat, RIAU)				ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Masyarakat se Provinsi Riau	12	100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK (Perpustakaan)		12	12	12		(Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat, RIAU)		ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Masyarakat se Provinsi Riau					
			Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan(Pendampingan mencapai ISO 2000) (Perpustakaan)				12	100.000.000,00	(Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat, RIAU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Masyarakat se Provinsi Riau					
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						502.133.929,00							588.076.429,00	
1.	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP						502.133.929,00					ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Masyarakat se Provinsi Riau		588.076.429,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi						77.341.400,00	(Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat, RIAU)						186.283.900,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Jumlah Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi (Berkas)				7920.00									
	2.24.02.1.01.0006	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis						77.341.400,00	(Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat, RIAU)					7920.00	186.283.900,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Jumlah Daftar Arsip Dinamis (Arsip)		7920.00	7920.00	7920.00		(Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat, RIAU)							

			Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis (Berkas)				7.920	77.341.400,00	(Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat, RIAU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Masyarakat se Provinsi Riau		
	2.24.02.1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi						220.318.455,00	(Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat, RIAU)					227.608.455,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Jumlah Pengelolaan Arsip Statis (OPD)				33.00								
	2.24.02.1.02.0005	Akuisisi Arsip Statis						220.318.455,00	(Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat, RIAU)					227.608.455,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi (Arsip)		550.00	550.00	550.00		(Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat, RIAU)				550.00		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis (Arsip)				550	220.318.455,00	(Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat, RIAU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Masyarakat se Provinsi Riau				
	2.24.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi						204.474.074,00	(Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat, RIAU)						174.184.074,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.24.02.1.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Pengguna Pelayanan Arsip SIKN (Arsip)				2600.00										
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN (Pengguna)		2600	2600	2600		(Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat, RIAU)				2600		62.855.983,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN (Pengguna)				2.600	62.855.983,00	(Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat, RIAU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Masyarakat se Provinsi Riau				
	2.24.02.1.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi						141.618.091,00	(Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat, RIAU)				ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Masyarakat se Provinsi Riau		111.328.091,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi (Laporan)		1	1	1		(Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat, RIAU)				1				
			Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi (Peningkatan SDM Arsiparis) (Laporan)				1	141.618.091,00	(Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat, RIAU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Masyarakat se Provinsi Riau				

3.3.3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk tahun anggaran 2024 sesuai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau Tahun 2024 adalah seperti ditunjukkan pada Tabel 4.1 dibawah ini. Tabel dibawah berisi Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) dan Program Perangkat Daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran pada dokumen Perubahan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau dan dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Riau.

Jumlah seluruh Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau di Tahun 2024 adalah sebanyak :

a. Program Dinas Perpustakaan dan kearsipan berjumlah 3 (Tiga) Program, terdiri dari :

- 1 (satu) Program Penunjang Urusan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Rp. 26.125.087.000,- (Dua Puluh Enam Milyar Seratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)
- 2 (Dua) Program Urusan, yaitu :
 - 1. Program Pembinaan Perpustakaan Rp. 546.488.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah)
 - 2. Program Pengelolaan Arsip Rp. 502.133.929,- (Lima Ratus Dua Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah)

b. Kegiatan Dinas Perpustakaan dan kearsipan berjumlah 9 (Sembilan) Kegiatan, terdiri dari :

- 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 6. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi
- 7. Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi
- 8. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi
- 9. Pengelolaan Simpul Jaringan Dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi

c. Sub Kegiatan Dinas Perpustakaan dan kearsipan berjumlah 24 (Dua Puluh Empat) Sub Kegiatan, terdiri dari :

- 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik atau Penerangan Bangunan Kantor
- 3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 7. Pengadaan Mebel
- 8. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 9. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 10. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 11. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 12. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 13. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 14. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 15. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 16. Pengembangan dan Pemeliharaan Perpustakaan Elektronik
- 17. Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai Standar Nasional Perpustakaan
- 18. Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi
- 19. Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
- 20. Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka

21. Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
22. Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis
23. Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN
24. Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi

Kebutuhan dana untuk pelaksanaan semua program dan kegiatan/sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 27.173.708.929,- (Dua Puluh Tujuh Milyar Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah)

Tabel 4.1

Daftar Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Riau Tahun 2024

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR						27.173.708.929,00							26.111.713.066,00	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						26.671.575.000,00							25.523.636.637,00	
1.	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	 <													

			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)				1.000	223.557.500,00	(Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat, RIAU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau			
	2.23.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						130.000.000,00	(Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat, RIAU)				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau		130.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAANDAN KEARSIPAN
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		1	1	1		(Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat, RIAU)				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau	1		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Paket)				1.000	130.000.000,00	(Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat, RIAU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau			
	2.23.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						125.835.071,00	(Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat, RIAU)				Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau		125.835.071,00	DINAS PERPUSTAKAANDAN KEARSIPAN
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		1	1	1		(Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat, RIAU)				Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau	1		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Paket)				1.000	125.835.071,00	(Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat, RIAU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau			
	2.23.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						300.000.000,00	(Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat, RIAU)				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau		300.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAANDAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)		1	1	1		(Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat, RIAU)				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau	1		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)				1.000	300.000.000,00	(Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat, RIAU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau			
	2.23.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						130.000.000,00	(Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat, RIAU)						225.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAANDAN KEARSIPAN
			Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipenuhi (Jenis)				3.00									
	2.23.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						100.000.000,00	(Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat, RIAU)						100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAANDAN KEARSIPAN
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)		0.00	1	1		(Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat, RIAU)					1		
			Pengadaan mebel (kursi putar bulat (untuk Pemustaka)) (Paket)				1.000	100.000.000,00	(Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat, RIAU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau			
	2.23.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						30.000.000,00	(Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat, RIAU)						125.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAANDAN KEARSIPAN
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnyayang Disediakan (Unit)		18	18	10		(Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat, RIAU)				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau	10		
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya (Komputer, Infocus, Scanner, Printer, CCTV, Drone, Print Head Printer Barcode) (Unit)				10.000	30.000.000,00	(Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat, RIAU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau			
	2.23.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.687.296.400,00	(Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat, RIAU)						3.687.296.400,00	DINAS PERPUSTAKAANDAN KEARSIPAN
			Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara (Jenis)				3.00									
	2.23.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						1.387.296.400,00	(Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat, RIAU)						1.387.296.400,00	DINAS PERPUSTAKAANDAN KEARSIPAN
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		1	1	1		(Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat, RIAU)					1		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)				1.000	1.387.296.400,00	(Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat, RIAU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau			
	2.23.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						2.300.000.000,00	(Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat, RIAU)						2.300.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAANDAN KEARSIPAN
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		1	1	1		(Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat, RIAU)				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau	1		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Laporan)				1.000	2.300.000.000,00	(Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat, RIAU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau			

	2.23.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan (Paket)				2.00	532.330.000,00	(Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat, RIAU)						676.600.000,00	DINAS PERPUSTAKAANDAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						44.030.000,00	(Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat, RIAU)						188.300.000,00	DINAS PERPUSTAKAANDAN KEARSIPAN
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)		1	1	1		(Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat, RIAU)					1		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan (Unit)				1.000	44.030.000,00	(Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat, RIAU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						188.300.000,00	(Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat, RIAU)				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau		188.300.000,00	DINAS PERPUSTAKAANDAN KEARSIPAN
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		7.00	7.00	7		(Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat, RIAU)			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau	7.00			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan(Unit)				7.000	188.300.000,00	(Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat, RIAU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau				
	2.23.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						150.000.000,00	(Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat, RIAU)				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau		150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAANDAN KEARSIPAN
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		38	38	38		(Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat, RIAU)			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau	152			
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Perbaikan RobotikScanner, Service AC, Service Komputer) (Unit)				38.000	150.000.000,00	(Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat, RIAU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau				
	2.23.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						150.000.000,00	(Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat, RIAU)				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau		150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAANDAN KEARSIPAN
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		1	1	1		(Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat, RIAU)			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau	4			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Rehab Gedung Arsip danGedung Sekretariat) (Unit)				1.000	150.000.000,00	(Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat, RIAU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau				
2.	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN						546.488.000,00							615.750.000,00	DINAS PERPUSTAKAANDAN KEARSIPAN
			Jumlah Perpustakaan yang memperoleh Akreditasi (Perpustakaan)				24.00						Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ProvinsiRiau			
	2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi						546.488.000,00	(Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat, RIAU)						615.750.000,00	DINAS PERPUSTAKAANDAN KEARSIPAN
			Jumlah Perpustakaan Tingkat Provinsi Yang Dikelola (Perpustakaan)				25.00									
	2.23.02.1.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan						140.000.000,00	(Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat, RIAU)						140.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAANDAN KEARSIPAN
			Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)		24	24	24		(Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat, RIAU)				24			

			Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan(Pembinaan SDM (tenaga pustaka se Provinsi Riau) (Perpustakaan)				24	140.000.000,00	(Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat, RIAU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Masyarakat se Provinsi Riau			
	2.23.02.1.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi						44.040.000,00	(Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat, RIAU)				ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Masyarakat se Provinsi Riau		100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAANDAN KEARSIPAN
			Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan TingkatDaerah Provinsi (Orang)		50.00	50.00	50.00		(Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat, RIAU)				ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Masyarakat se Provinsi Riau	50.00		
			Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi (Bimtek SDM/Pustakawan) (Orang)				50	44.040.000,00	(Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat, RIAU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Masyarakat se Provinsi Riau			

	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis (Arsip)				550	220.318.455,00	(Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat, RIAU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Masyarakat se Provinsi Riau			
	2.24.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi						204.474.074,00	(Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat, RIAU)						174.184.074,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Pengguna Pelayanan Arsip SIKN (Arsip)				2600.00									
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN (Pengguna)		2600	2600	2600		(Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat, RIAU)				2600		62.855.983,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN (Pengguna)				2.600	62.855.983,00	(Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat, RIAU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Masyarakat se Provinsi Riau			
			2.24.02.1.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi					141.618.091,00	(Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat, RIAU)				ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Masyarakat se Provinsi Riau		111.328.091,00
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi (Laporan)		1	1	1		(Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat, RIAU)				ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Masyarakat se Provinsi Riau	1			
	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi (Peningkatan SDM Arsiparis) (Laporan)				1	141.618.091,00	(Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat, RIAU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Masyarakat se Provinsi Riau					
	JUMLAH							27.173.708.929,00							26.111.713.066,00	

5.1. Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian

Uraian rencana program / kegiatan yang terdapat pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 ini diharapkan nantinya sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan kearsipan Provinsi Riau sehingga tujuan dan sasaran yang diharapkan akan tercapai sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah Provinsi Riau.

Dalam perjalanannya, apabila terdapat suatu kendala dimana dana yang tersedia belum memenuhi kebutuhan yang tercakup pada Renja Tahun 2024 ini maka kegiatan-kegiatan yang belum terealisasi dapat diusulkan kembali berdasarkan hasil evaluasi.

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan/sub kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan yang diukur berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan kearsipan Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024 dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program dan kegiatan/sub kegiatan mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan antara kegiatan/sub kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Renja Perpustakaan dan kearsipan Provinsi Riau Tahun 2024 sebagai berikut :

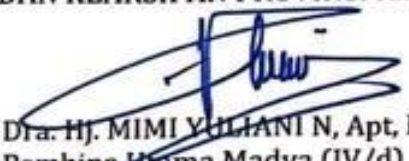
1. Setiap pelaksanaan program dan kegiatan/sub kegiatan pada unit kerja di lingkungan Dinas Perpustakaan dan kearsipan Provinsi Riau berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan/sub kegiatan pembangunan perpustakaan dan kearsipan Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kaidah dan peraturan yang berlaku serta mempedomani visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah.
2. Dinas Perpustakaan dan kearsipan Provinsi Riau berkewajiban untuk melaksanakan Renja PD ini sesuai dengan yang termuat di dalam tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan/sub kegiatan strategis Dinas Perpustakaan dan kearsipan Provinsi Riau.
3. Dinas Perpustakaan dan kearsipan Provinsi Riau berkewajiban menjamin konsistensi pencapaian target pembangunan sesuai Perubahan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

1. Renja Tahun 2024 dipergunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), selanjutnya RKA juga sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Pagu anggaran yang tercantum dalam Renja ini masih bersifat indikatif, dengan demikian penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun Anggaran 2024 selain mengacu pada Renja ini disusun berdasarkan standar biaya, standar akuntansi pemerintah, dan kebijakan penganggaran pemerintah.

Pekanbaru, 24 Agustus 2023

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN PROVINSI RIAU,



Dra. Hj. MIMI YULIANI N, Apt, MM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19660717 199102 2 001